

# Pelemahan Ruang Hidup Masyarakat Lokal Di Destinasi Wisata Gili Trawangan

\*Hadi Abdurrahman<sup>1</sup>, Tri Wahyuningsih<sup>1</sup>, Azizah Putri Abdi<sup>1</sup>, Muhammad Adhim Halim<sup>1</sup>, Adina Khusnudzan Hadid<sup>1</sup>

<sup>1)</sup> Prodi PWK Jurusan Teknik Arsitektur, Fakultas Teknik Universitas Tadulako

\*Corresponding Author, Email: [hadiabdurrahman@untad.ac.id](mailto:hadiabdurrahman@untad.ac.id)

Info Artikel	Abstrak
<p><b>Riwayat Artikel:</b> Diterima: 18 September 2024</p> <p>Disetujui: 18 Nopember 2024</p>	<p>Salah satu kawasan yang berkembang dan sudah menjadi tujuan wisatawan domestik dan asing saat ini adalah Gili Trawangan. Berkembangnya suatu destinasi memang menjadi satu capaian yang harus di apresiasi, namun di sisi lain keberhasilan tersebut perlu di waspadai. Azhar (2013) dalam penelitiannya di Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung menemukan bahwa justru di balik kesuksesan membangun pariwisata di desa tersebut justru menyisakan sisi gelap pembangunan, yaitu termarjinalkannya masyarakat lokal desa tersebut khususnya dalam kepemilikan dan hak katas tanah. Dalam penelitian ini penulis ingin mengidentifikasi fenomena pelemahan ruang hidup masyarakat lokal akibat perkembangan pariwisata di Gili Trawangan. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologi, yaitu melihat fenomena dan realitas yang tampak, kemudian mengkaji penjelasan atau makna yang terkandung di dalamnya dengan mengumpulkan fakta empirik di lapangan (Kahija, 2017). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa memang benar terjadi pelemahan ruang hidup masyarakat lokal akibat perkembangan pariwisata di Gili Trawangan. Pelemahan ruang hidup masyarakat lokal disini terjadi karena faktor langsung dan tidak langsung. Faktor langsung yang di maksud seperti pelemahan secara sosial dan ekonomi, sedangkan faktor tidak langsung adalah akibat kebijakan pemerintah yang paradoksal. Di satu sisi pariwisata dengan segala dinamikanya di harapkan mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat lokal, namun di sisi lain kebijakan tersebut justru berdampak terhadap pelemahan terhadap penguasaan tanah atau ruang hidup masyarakat lokal di Gili Trawangan.</p> <p><b>Kata kunci:</b> Pelemahan, ruang hidup, masyarakat lokal, pariwisata</p>

## I. PENDAHULUAN

Pada dasarnya setiap pembangunan yang dilakukan adalah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Begitu juga dalam pengelolaan dan pengembangan sektor pariwisata, seperti yang dimuat dalam UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, bahwa salah satu tujuan kepariwisataan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pariwisata diselenggarakan dengan prinsip menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, kearifan lokal dan memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat.

Modernisasi dan kemajuan zaman merupakan satu keniscayaan dan telah memberikan banyak kontribusi bagi kita. Namun jika tidak disertai dengan tindakan yang bijak dan landasan iman yang kuat, maka sangat dimungkinkan akan menjadi satu masalah baru dalam masyarakat, khususnya di daerah pedesaan. Begitu juga dalam perkembangan pariwisata di satu destinasi. Pariwisata tidak hanya memberikan dampak positif, ragam budaya dan gaya hidup yang dibawa

oleh wisatawan sangat mampu mempengaruhi dan bahkan merubah nilai budaya, adat-istiadat dan bahkan identitas asli yang sudah turuntemurun dan menjadi karakter masyarakat aslinya.

Pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan nasional yang berkembang cukup pesat saat ini, termasuk bagi Kabupaten Lombok Utara (KLU). KLU merupakan kabupaten termuda di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), terbentuk pada tahun 2008 yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Lombok Barat. Kekayaan, keindahan dan keunikan sumber daya alamnya menjadikan pemda KLU terus berupaya untuk mengembangkan kawasan-kawasan yang dianggap memiliki potensi untuk dikembangkan, khususnya sebagai Daerah Tujuan Wisata (DTW). Salah satu kawasan yang sedang dikembangkan dan sudah menjadi tujuan wisatawan domestik dan asing saat ini adalah Gili Trawangan.

Gili Trawangan merupakan satu dari tiga pulau kecil yang merupakan bagian dari Desa Gili Indah. Gili Trawangan merupakan sebuah pulau kecil yang awalnya di huni pendatang dari suku Bugis dan mandar yang kemudian di susul oleh masyarakat suku Sasak. Ketiga suku ini beragama Islam dan memiliki keyakinan yang kuat. Latar belakang budaya yang berbeda tidak merusak kekerabatan dan justru menghasilkan interaksi social serta aktivitas budaya yang khas dan beragam.

Keberhasilan dalam pengembangan sektor pariwisata sering kali hanya dinilai dari aspek fisik saja, seperti banyaknya infrastruktur dan fasilitas pendukung pariwisata yang terbangun serta jumlah kunjungan pariwisata yang terus meningkat. Penilaian keberhasilan pembangunan di sektor pariwisata sangat jarang dilihat dari aspek social, budaya dan kesejahteraan masyarakat lokal yang berada di suatu destinasi (Inda Rosyida, 2013).

Pitana et al. (2005) mengatakan bahwa kegiatan pariwisata memang memberikan banyak dampak positif, namun secara bersamaan akan memberikan dampak negative yang tidak sedikit. Kemudian Mill (2000) menyatakan bahwa pariwisata dapat memberikan keuntungan bagi wisatawan maupun komunitas tuan rumah dan dapat menaikkan taraf hidup melalui keuntungan secara ekonomi yang dibawa ke kawasan tersebut. Namun Xue et al. (2017) dalam sebuah penelitiannya menemukan bahwa pengembangan kegiatan pariwisata berdampak pada perubahan identitas masyarakat desa di China. Perubahan tersebut terlihat dari perubahan gaya hidup masyarakat lokal yang sudah banyak dipengaruhi oleh budaya dan gaya hidup wisatawan yang berkunjung.

Keberhasilan pembangunan pariwisata di Gili Trawangan memang menjadi satu capaian yang harus di apresiasi, namun di sisi lain juga menjadi hal yang harus di waspadai. Azhar (2013) dalam penelitiannya di Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung menemukan bahwa justru di balik kesuksesan membangun pariwisata di desa tersebut justru menyisakan sisi gelap pembangunan, yaitu termarjinalkannya masyarakat lokal desa tersebut khususnya dalam kepemilikan dan hak katas tanah. Masyarakat seolah hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri akibat ketidakberdayaan mereka melawan arus perubahan kepemilikan hak katas tanah mereka yang secara diam-diam telah di caplok oleh korporasi/pemodal besar yang selama ini di kembangkan sebagai pengembangan usaha dan jasa di bidang pariwisata seperti hotel, vila, restaurant, dll.

Oleh sebab itu, Menjadi satu topik yang menarik untuk di lakukan kajian terkait bagaimana perkembangan pariwisata dan dampaknya terhadap pelemahan ruang hidup masyarakat lokal di Gili Trawangan.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode induktif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Metode kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti

merupakan instrumen kunci (Sugiyono, 2005). Perbedaannya dengan penelitian kuantitatif adalah penelitian ini berangkat dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas dan berakhir dengan sebuah teori.

Moleong setelah melakukan analisis terhadap beberapa definisi penelitian kualitatif kemudian membuat definisi sendiri sebagai sintesis dari pokok-pokok pengertian penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2005) Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Pendekatan fenomenologi digunakan untuk melihat fenomena dan realitas yang tampak, kemudian mengkaji penjelasan atau makna yang terkandung di dalamnya dengan mengumpulkan fakta empiric di lapangan. Lebih lanjut, Kahija (2017) menekankan bahwa pendekatan fenomenologi diterapkan sebagai pendekatan dalam penelitian kualitatif yang bertujuan memahami pengalaman hidup dari orang yang mengalami langsung suatu peristiwa (fenomena).

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perkembangan suatu destinasi menjadi Kawasan pariwisata memang selalu memberikan dampak ganda, yaitu dampak positif dan negatif. Di satu sisi, pariwisata di Gili Trawangan dengan perkembangannya yang sangat pesat mampu memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) KLU, namun di sisi lain, di sadari atau tidak bahwa perkembangan pariwisata disana juga justru membuat masyarakat lokal merasakan beberapa dampak negatif, salah satunya adalah lemahnya hak atas kepemilikan lahan atau ruang hidup.

#### **3.1. Menjual Lahan**

Di tetapkannya suatu kawasan menjadi destinasi wisata memicu peningkatan harga dan sewa lahan di kawasan tersebut (Mill, 2000). Begitu juga halnya di Gili Trawangan, perkembangan pariwisata yang begitu pesat menyebabkan harga lahan di Kawasan tersebut menjadi tinggi. Namun demikian, peningkatan harga lahan tersebut juga di sertai dengan biaya pajak yang tinggi sehingga tidak sedikit dari masyarakat local justru memilih menjual lahan-lahan mereka yang lokasinya sangat strategis ketimbang mengembangkan dan menggunakannya untuk membangun usaha. Masyarakat lokal juga lebih memilih menjual lahan-lahan mereka karena beberapa alasan berikut:

- 1) Pajak yang tinggi  
Pajak yang tinggi menjadi alasan utama masyarakat lokal Gili Trawangan menjual lahan-lahan mereka. Mereka merasa bahwa pajak yang tinggi tidak sesuai dengan penghasilan yang mereka dapatkan.
- 2) Lebih cepat mendapatkan uang  
Informan menyatakan bahwa dengan menjual langsung lahan tersebut, masyarakat lebih cepat mendapatkan uang ketimbang membiarkan lahan tersebut tidak produktif namun tetap membayar pajak yang tinggi.
- 3) Harga lahan yang tinggi  
Hampir semua responden menyatakan bahwa mereka lebih memilih menjual lahan-lahan mereka karena harga jual lahan yang tinggi. Uang hasil penjualan lahan tersebut dapat mereka gunakan untuk membeli lahan di tempat lain dan sisanya masih dapat di gunakan untuk membangun usaha atau bisnis baru.

- 4) Masyarakat sudah tidak nyaman dengan aktivitas wisata di sekitarnya  
Sebagian besar informan menyatakan bahwa banyak masyarakat yang lebih memilih menjual lahan mereka karena sudah merasa tidak nyaman dengan aktivitas pariwisata di pesisir timur pulau tersebut. Aktivitas wisata di Gili Trawangan memang tidak hanya di siang hari, namun justru lebih ramai dan meriah saat malam hari. Hal tersebut yang menyebabkan tidak sedikit masyarakat lokal merasa tidak nyaman dan lebih memilih pindah bermukim di bagian tengah dan barat Gili Trawangan.

Menurut beberapa informan, tanah-tanah strategis di Gili Trawangan tidak hanya di kuasai oleh investor lokal, namun sudah banyak di kuasai asing. Namun saat membeli hingga pengelolaannya memang mengatasnamakan warga lokal, agar proses perizinan dan urusan administrasi lainnya di permudah. Fenomena lain yang menarik adalah tidak sedikit wisatawan asing menikah dengan warga lokal yang sebenarnya salah satu tujuannya adalah untuk kemudahan investasi di Gili Trawangan. Hal tersebut sesuai dengan penuturan beberapa informan, salah satunya yang di sampaikan oleh Pak H. LDN berikut:

*"...kadang bule-bule ni merangkatnya kanca tau ita tagernya pada gampang investasi ite wah"*

*"...terkadang bule-bule yang datang sampai menikahi warga lokal hanya untuk kemudahan investasi disini"*

(Pak H. LDN, 2023)

### 3.2. Dampak Pariwisata Bagi Masyarakat

Dalam upaya untuk pengelolaan sektor pariwisata, terdapat beberapa pengaruh yang tidak dapat dihindari sebagai akibat datangnya wisatawan ke suatu destinasi yang mempunyai kondisi berbeda dari tempat asal wisatawan tersebut (Pitana & Gayatri, 2005).

Kegiatan pariwisata pada suatu destinasi cenderung akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat lokal seperti peningkatan pendapatan, lapangan pekerjaan yang variative dan menciptakan peluang usaha baru (Aref, 2011). Begitu pula yang di rasakan masyarakat lokal Gili Trawangan. Keberadaan pariwisata di rasa sudah cukup mampu memberikan banyak dampak positif terhadap perekonomian masyarakat lokal. Masyarakat lokal memiliki banyak pilihan pekerjaan dan tidak sedikit masyarakat memiliki peluang untuk membuka usaha untuk pemenuhan kebutuhan wisatawan seperti took klontong, persewaan sepeda, homestay dan jasa perjalanan wisata.



*Gambar 1. Jasa Transportasi Milik Masyarakat Lokal*

Sumber : Observasi, 2023

Namun demikian, kegiatan pariwisata di Gili Trawangan justru memberikan dampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat. Dampak sosial yang paling di rasakan adalah pola dan gaya hidup yang mulai banyak di pengaruhi oleh wisatawan. Budaya wisatawan terutama wisatawan asing sudah sangat mempengaruhi budaya dan gaya hidup masyarakat lokal, terutama kaum muda di Gili Trawangan. Budaya yang paling terlihat adalah gaya bahasa, gaya berpakaian hingga perilaku alcohosilm.

Pengaruh sosial ini juga cukup berpengaruh terhadap pelemahan ruang hidup masyarakat lokal di Gili Trawangan. Karena tidak sedikit masyarakat lokal justru menjual tanah mereka untuk kemudian bermigrasi ke pulau Lombok. Kebanyakan masyarakat lokal Gili Trawangan memilih pindah dan keluar dari Gili Trawangan dengan alasan sudah tidak nyaman dengan budaya yang di bawa oleh para wisatawan. Kegiatan wisata di Gili Trawangan juga di rasa mulai mengganggu aktivitas beribadah, terutama bagi kaum muslim. Selain itu, yang menjadi alasan masyarakat lebih memilih pindah untuk bermukim di pulau Lombok adalah untuk menjauhkan anak-anak mereka dari lingkungan wisata yang di rasa sudah tidak ramah anak. Karena Gili Trawangan merupakan Kawasan wisata yang cukup massive dan para wisatawan seringkali berpenampilan yang seharusnya tidak untuk di saksikan oleh anak-anak.

### 3.3. Kebijakan Pemerintah

Seiring dengan berlakukannya otonomi daerah, sampai saat ini di daerah sangat sulit menghindari munculnya berbagai macam masalah kebijakan yang seringkali tidak memihak kepada masyarakat. Salah satu dari kegagalan politik desentralisasi ini bertumbuhkembangnya relasi bisnis kapital antara pengusaha dan negara yang kini sulit dihindarkan. Gurita menjamurnya relasi ini pun menjamur pula sampai ke tingkat bawah (baca: daerah) yang kini semakin banyak dijumpai dalam dinamika politik lokal di tingkat daerah. Banyak elit politik yang membarterkan kewenangan yang mereka miliki dengan suntikan dana dari kekuasaan kapital tertentu yang mempunyai kepentingan ekonomi. Semakin mahal dan tidak transparannya suatu sistem politik, semakin besar aktor politik itu bergantung kepada oligarki kapital.

Sukses pembangunan pariwisata di Kabupaten Lombok Utara secara umum tidak lepas dari analisis seperti ini, sehingga melahirkan politik budaya, yakni adanya gerakan kepada masyarakat yang tidak memiliki kekuatan apapun selain kepasrahan ketika penguasa melakukan kebijakan keterpinggiran terhadap diri mereka. Suatu kebijakan dengan perencanaan awal yang mengandung keinginan mendalam untuk mensejahterakan masyarakat lokal di kawasan itu dengan mengundang kekuatan investor sebagai motor penggerak ekonomi, tetapi realitas dalam pelaksanaannya pembangunan kawasan tersebut berjalan penuh dengan kekuatan penguasaan wacana dan kekuatan yang menghegemonik.

Sebagai ikon dan figurasi pariwisata KLU, Gili Trawangan telah menjelma menjadi salah satu destinasi wisata dunia yang sangat populer. Pariwisata tidak ubahnya bak generator penggerak pembangunan perekonomian masyarakat KLU. Sumbangsihnya dalam mendorong perkembangan perekonomian masyarakat lokal dan bahkan masyarakat KLU tidak terbantahkan lagi. Dari berbagai pengamatan empiris, tidak kurang 80% dari seluruh masyarakat lokal Gili Trawangan khususnya menggantungkan hidupnya pada pariwisata di kawasan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tidak salah jika pada akhirnya pemerintah KLU sebagai pemegang otoritas dan legitimasi beserta seluruh stakeholdernya yang berinteraksi langsung ditataran implementatif mulai mengulirkan konsep pengembangan pariwisata yang berkelanjutan demi menjaga konsistensi dan kontinuitas peran dan kontribusinya di KLU.

Pemerintah daerah KLU membuat satu peraturan tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Pemenang Tahun 2014-2034 yang di dalamnya di tetapkan zonasi kawasan wisata Gili Trawangan. penetapan zonasi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar Kawasan Gili Trawangan di tetapkan sebagai Kawasan pariwisata, yang artinya bahwa Kawasan tersebut

di arahkan fungsinya sebagai Kawasan pariwisata, tidak untuk fungsi lain. Dampak dari kebijakan tersebut adalah lahan pada Kawasan yang sudah di zonasi tersebut di tetapkan pajak yang tinggi, sehingga masyarakat yang bermukim dalam Kawasan tersebut tidak mampu membayar pajak dan pada akhirnya menjual lahan milik mereka.

Selain itu adanya tawaran yang melebihi hasil pengolahan lahan seperti biasanya menyebabkan masyarakat tertarik untuk mengalihkan lahannya kepada pihak lain yang mampu mengelola lahan yang kurang produktif tersebut. Hal ini menjadi salah satu pendorong masyarakat melepas hak miliknya kepada pihak lain. Apalagi ada janji-janji yang akan memperkerjakan pemilik lahan pada usaha yang akan didirikan menjadikan masyarakat melepas haknya sebagai pemilik.

#### **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **4.1 Kesimpulan**

Pelemahan ruang hidup masyarakat lokal Gili Trawangan dapat dilihat dari banyaknya masyarakat lokal yang menjual lahan atau tanah mereka dan lebih memilih untuk pindah ke bagian tengah dan barat pulau.

Pelemahan ruang ini dapat di kategorikan menjadi dua faktor utama, yaitu faktor langsung dan tidak langsung. Faktor langsung yang dimaksud adalah akibat dampak pariwisata yang di rasakan secara langsung oleh masyarakat lokal, seperti kenaikan pajak dan pola hidup asing yang bebas. Sedangkan faktor tidak langsung yang menjadi penyebab pelemahan ruang masyarakat lokal di Gili Trawangan adalah kebijakan pemerintah yang paradoksal.

Disatu sisi pariwisata dengan segala dinamikanya akan diproyeksikan untuk meningkatkan kemakmuran bagi masyarakatnya, akan tetapi di sisi lain munculnya kebijakan itu menimbulkan keterpinggiran masyarakat dalam hal kepemilikan hak atas tanahnya tidak bisa dihindarkan. Hal tersebut, karenakan kebijakan ini tunggangi oleh pola relasi bisnis dan kuasa demi peningkatan sumber asli pendapatan daerah (PAD). Pemerintah mengandalkan kekuatan korporasi untuk untuk menggerakkan industri pariwisata. Kerjasama keduanya menimbulkan ketidakberdayaan masyarakat terhadap kepemilikan lahan mereka.

##### **4.2 Saran**

Berdasarkan hasil temuan empiris dan Analisa mendalam, maka dalam penelitian ini penulis mencoba meberikan beberapa rekomendasi. Rekomendasi dalam penelitian ini secara spesifik untuk pemerintah daerah, masyarakat local dan rekomendasi untuk penelitian berikutnya.

Untuk pemerintah daerah di harapkan berkomitmen untuk menjalankan kebijakan yang sudah di buat dengan sebaik dan seamanah mungkin tanpa di sertai dengan kepentingan ganda. Pemerintah juga di harapkan sepenuhnya mengawasi proses pembangunan khususnya dalam pengembangan kepariwisataan daerah Kabupaten Lombok Utara. Selain itu, pemerintah juga seharusnya memberikan edukasi kepada masyarakat untuk memperkuat pertahanan kepemilikan ha katas tanah agar tidak dengan mudah melakukan pemindahan kepemilikan kepada para pemodal besar/investor.

Kemudian untuk masyarakat lokal seharusnya tidak mudah terpengaruh dengan tingginya harga tanah yang kemudian dapat di nikmati dalam waktu yang hanya sesaat. Masyarakat lokal harusnya lebih menyadari bahwa tanah tersebut akan memiliki nilai yang lebih

besar apabila di kelola untuk membangun usaha atau mengembangkannya dengan sistem kerjasama tanpa menjual seluruh tanahnya secara masif kepada pihak investor.

Yang terakhir adalah rekomendasi untuk penelitian berikutnya adalah agar memperluas lokus dan fokus penelitian, yaitu dari segi partisipan maupun wilayah kajian. Untuk wilayah kajian misalnya dapat di tingkatkan menjadi skala yang lebih luas mencakup dua gili lainnya, yaitu Gili Air dan Gili Meno. Kemudian dari segi partisipan dapat melibatkan pihak investor, pengembang atau bahkan pihak pemerintah, sehingga hasilnya dapat di komparasi untuk kedepannya dapat menjadi dasar pemerintah untuk menentukan kebijakan pengembangan Kawasan wisata Gili Indah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Azhar, M. A. (2013). Marginalisasi Masyarakat di Daerah Pariwisata: Studi Kasus di Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, 4, 166-176.
- [2] Inda Rosyida, E. (2013). Seks dan Pariwisata: Fenomena Penginapan Esek-esek Songgoriti. *Paradigma*, 01, 36-45.
- [3] Kahija, Y. L. (2017). *Penelitian Fenomenologis*. Yogyakarta: PT. Kanisius.
- [4] Mill, R. C. (2000). *Tourism The International Bussiness*. Jakarta: PT.Grafindo Persada.
- [5] Pitana, I. G., & Gayatri, P. G. (2005). *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta: Andi.
- [6] Xue, L., Kerstetter, D., & Hunt, C. (2017). Tourism development and changing rural identity in China. *Annals of Tourism Research*, 66, 170-182. doi: <https://doi.org/10.1016/j.annals.2017.07.016>